



POLICY BRIEF

PELUANG DAN DUKUNGAN BUMN DALAM BISNIS PETROKIMIA NASIONAL

Iwan Niswanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Industri pengolahan merupakan sektor esensial dalam perekonomian, sektor petrokimia merupakan salah satunya. *Demand* akan kebutuhan produk petrokimia sangat besar dan belum dapat dipenuhi oleh *supply* yang ada. Tujuan penulisan *policy brief* ini adalah memberikan pandangan terhadap peluang BUMN dalam mengisi kekurangan pasokan dan sekaligus menekan angka impor petrokimia. Tetapi dibalik peluang tersebut terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah kesulitan pendanaan serta kesulitan lain-lainnya. Rekomendasi yang disampaikan adalah dengan memberikan fasilitas pendanaan, kemudahan fiskal dan penyediaan lahan.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 di banyak negara secara signifikan telah mengurangi pertumbuhan ekonomi global, Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020. Namun pada Q2-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7,07%(YoY) yang merupakan pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak 16 tahun terakhir, salah satu *leading sector* yang menyumbang tingginya pertumbuhan ekonomi adalah industri pengolahan yang menyumbang nilai pertumbuhan 6,58 % YoY. Dapat dikatakan pengaruh pandemi Covid-19

terhadap industri kimia tidak terlalu dirasakan, hal ini karena produk dari industri kimia banyak digunakan dalam menangani pandemi Covid-19, seperti produk etanol untuk *hand sanitizer*, obat-obatan dan produk pembersih lainnya. Selain itu produk petrokimia seperti *polipropilena* juga digunakan menjadi bahan baku masker dan kebutuhan perlindungan diri lainnya.

Dalam pemenuhan kebutuhan barang-barang rumah tangga, kita tidak akan lepas dengan industri petrokimia. Data Kementerian Perindustrian, nilai Impor bahan kimia Indonesia pada tahun 2020 senilai USD 15,9 miliar dengan volume 25,1 Juta Ton, impor ini menempati

rangking ke-2 setelah impor mesin/perlengkapan. Angka impor terbesar adalah impor industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik dengan angka USD 4,5 milyar. Hal ini menunjukkan belum tercukupinya kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri sehingga memerlukan impor dari berbagai negara, nilai impor ini yang diprediksi ini akan terus meningkat pada masa yang akan datang.

No	KBLI	JENIS INDUSTRI	2019		2020	
			VOLUME IMPOR (TON)	NILAI IMPOR (US\$)	VOLUME IMPOR (TON)	NILAI IMPOR (US\$)
1	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK	4.181.446	5.871.020.772	3.554.984	4.517.427,64
2	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	4.085.095	3.036.448.574	4.380.774	2.444.183,81
3	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	637.200	1.397.932.488	667.815	1.399.577,71
4	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	1.118.611	1.451.872.774	886.729	1.196.709,91
5	20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO	5.418.625	1.252.393.884	5.337.301	1.030.123,71

Sumber: Kemenperin, 2021

Dari angka impor di atas, terdapat beberapa peluang dalam pengembangan industri petrokimia nasional yang tentunya dapat memenuhi *demand* dalam negeri. Sampai tahun 2030 tercatat ada beberapa badan usaha yang akan berinvestasi di sektor petrokimia salah satunya adalah BUMN Migas kita PT Pertamina (Persero).

Saat ini PT Pertamina hanya *memiliki share market* sekitar 10% di sektor petrokimia, dan bagi Pertamina kedepannya sektor petrokimia merupakan *attractive growth market* di Indonesia dan *key long-term growth driver*, dengan potensi *revenue* yang mencapai USD10 Milyar dari seluruh portfolio produk. Beberapa proyek untuk mewujudkannya adalah dengan membangun dan mengembangkan kilang di Balikpapan dan Cilacap serta membangun kilang baru dengan kerjasama pihak swasta di Tuban, Balongan. Selain PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia juga akan membangun proyek

petrokimia di Bintuni, Papua Barat. Selain BUMN, pelaku usaha swasta juga akan mengembangkan pabrik petrokimia eksistingnya diantaranya adalah Chandra Asri Petrochemical (CAP2) dan Lotte Chemical Indonesia.

Apabila seluruh proyek tersebut dapat terealisasi, maka Indonesia menjadi negara Petrokimia No.1 di ASEAN dengan tambahan total kapasitas Olefin sebesar 5.675 KTA serta tambahan total kapasitas Poliolefin sebesar 4.715 KTA. Dengan tambahan kapasitas tersebut maka total kapasitas Olefin Indonesia sebesar 7.730,2 KTA dan Poliolefin sebesar 6.836 KTA.

NO	NEGARA ASEAN	OLEFIN			TOTAL (KTA)	NO	NEGARA ASEAN	TOTAL (KTA)
		C2 (KTA)	C3 (KTA)	TOTAL (KTA)				
1	THAILAND	4978	2176	7.154	1	INDONESIA	7.730	
2	SINGAPORE	4055	2466	6.521	2	THAILAND	7.154	
3	MALAYSIA	3075	2337	5.412	3	SINGAPORE	6.521	
4	INDONESIA	900	1.155	2.055	4	MALAYSIA	5.412	
5	PHILIPPINES	480	250	730	5	PHILIPPINES	730	
6	AUSTRALIA	472	35	507	6	AUSTRALIA	507	

NO	NEGARA ASEAN	POLIOLEFIN			TOTAL (KTA)	NO	NEGARA ASEAN	TOTAL (KTA)
		HOPE (KTA)	LDOPE (KTA)	PP (KTA)				
1	THAILAND	1920	1450	2305	5.675	1	INDONESIA	6.836
2	SINGAPORE	400	2155	1485	4.040	2	THAILAND	5.675
3	MALAYSIA	855	470	1540	2.865	3	SINGAPORE	4.040
4	INDONESIA	586	600	890	2.076	4	MALAYSIA	2.865
5	VIETNAM			1000	1.000	5	VIETNAM	1.000
6	PHILIPPINES	335,34	110	300	745,34	6	PHILIPPINES	745,34
7	AUSTRALIA	204	125		329	7	AUSTRALIA	329

Sumber: Kemenperin, 2021

Dari beberapa proyek petrokimia, masih banyak kendala dan masalah yang harus mendapat mendapatkan perhatian pemerintah, salah satunya adalah proses pembangunan pabrik petrokimia mulai dari penyediaan lahan, pemberian harga gas bumi tertentu dan perizinan lainnya.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada policy brief ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana peluang pengembangan industri petrokimia di Indonesia, khususnya untuk BUMN?
2. Dukungan apa yang harus diberikan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri petrokimia

ANALISIS

Indonesia memiliki sumber bahan baku industri petrokimia (minyak bumi, gas alam, batubara, *biomasssa*) yang cukup besar. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku (*feedstock*) industri petrokimia yang dapat menghasilkan olefin, aromatik dan senyawa-senyawa lain yang diturunkan dari bahan baku tersebut, yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bahan bakunya.

Kebutuhan petrokimia dalam negeri yang tinggi tidak diikuti dengan suplai yang mencukupi dari dalam negeri sehingga lebih dari separuh kebutuhan petrokimia dipenuhi dari impor yang pada akhirnya mengakibatkan defisit neraca perdagangan. Dalam rangka mengurangi ketregantungan impor sekaligus menekan defisit transaksi perdagangan maka pemerintah akan memaksimalkan *asset* produsen petrokimia dalam negeri.

Industri kimia merupakan sektor tiga besar (Top 3) kontributor penopang kinerja industri pengolahan nonmigas dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Industri Petrokimia menjadi salah satu Industri yang berkontribusi besar dalam PDB, serta berkaitan dengan industri hilir lain seperti plastik, serat

sintetik, karet sintetik, kosmetik, pupuk dan tekstil.

Industri Petrokimia dapat dibagi Industri petrokimia hulu (dasar), industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir. Industri petrokimia dasar merupakan industri paling hulu dalam rangkaian industri petrokimia, memproses bahan baku berupa naphta dan/atau kondensat menjadi olefin, aromatik, dan parafin. Contoh: industri olefin (ethylene, propiline, butadiene, dll), industri aromatik (benzene, toluene, xylene, dll), industri berbasis C-1 (ammonia, methanol). Industri petrokimia antara. Industri petrokimia antara adalah industri yang memproses bahan baku olefin, aromatik (produk industri petrokimia hulu) menjadi produkproduk turunannya seperti vinyl chloride, styrene, ethylene glycol, dll. Industri petrokimia hilir merupakan industri yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri petrokimia antara menjadi berbagai produk akhir yang digunakan oleh industri atau konsumen akhir (industrial dan consumer goods). Contoh: Polietilena (HDPE, LDPE, LLDPE); Polipropilena (PP); Polistirena (PS); Polivinilkhlorida (PVC); PET, karet sintetis (ABS), serat sintetis (polyester, nilon), dll. Industri petrokimia merupakan faktor pendorong untuk pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian karena produk petrokimia memiliki aplikasi pada seluruh produk penggunaan sehari-hari dan mencakup hampir setiap bidang kehidupan seperti konstruksi, mobil, pertanian, kemasan, dan lainnya.

Pentingnya pengembangan industri petrokimia dapat dilihat dari Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara dengan PDB terbesar pertama dan kedua. Salah satu (1) kontribusi utama dari PDB Amerika Serikat dan Tiongkok berhubungan erat dengan industri petrokimia. Komposisi

kontributor utama dalam PDB Amerika Serikat yaitu sektor jasa (60,9%) dan industri (28,2%), dan komposisi sektor utama di Tiongkok, terdiri dari sektor jasa (52,2%) dan industri (39,5%) yang mencakup tambang, konstruksi, manufaktur dan lainnya.

Dinamika industri petrokimia tidak dapat dilepaskan dari dinamika industri minyak bumi dan gas sebagai bahan baku utama dari pengembangan produk-produk petrokimia. Industri minyak bumi dan gas sendiri dapat dikatakan cukup rentan karena pergerakan harga minyak bumi di dunia yang tidak menentu. Dari sisi penawaran fluktuasi harga minyak bumi dunia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan atau pasokan minyak oleh negara-negara produsen, baik negara-negara yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (“OPEC”) maupun negara non-OPEC. Ketersediaan atau pasokan minyak sangat erat kaitannya dengan kapasitas produksi, kapasitas investasi dan infrastruktur kilang.

Negara-negara lain di Asia Pasifik juga sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan domestik masing-masing. Di Vietnam, Vietnam Oil and Gas Group bersama dengan Siam Cement Group sedang membangun kompleks petrokimia pertama di Vietnam yang dinamakan Long Son Petrochemicals. Kilang tersebut akan membantu menambah produksi propylene sebesar 1,1 juta ton per tahun, polypropylene sebesar 1,1 juta ton per tahun, dan xylenes sebesar 1,1 juta ton per tahun. Long Son Petrochemicals diperkirakan akan mulai beroperasi di tahun 2022. Selain itu, Malaysia juga sedang mengembangkan kilang minyak bumi dan pabrik petrokimia terintegrasi yang dinamakan Petronas Rapid Project. Proyek tersebut terdiri dari kilang minyak bumi berkapasitas 300.000 barel/hari dan kompleks

petrokimia yang dapat memproduksi berbagai macam produk dengan kapasitas keseluruhan sebesar 3,5 juta ton per tahun.

Dari uraian di atas negara-negara lain sedang gencar melakukan penambahan produksi petrokimia. Hal ini menunjukkan peranan penting industri petrokimia dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Penambahan produksi industri petrokimia di Indonesia khususnya sebelum tahun 2014 dirasakan tidak ada penambahan kapasitas. Pemerintah di awal tahun 2015 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri. Dalam regulasi ini, Pemerintah memberikan beberapa opsi kemudahan pembangunan dan pengembangan kilang. Selain itu, dengan regulasi ini Pertamina ditunjuk sebagai BUMN yang harus mengembangkan industri petrokimia dengan membangun kilang baru terintegrasi petrokimia atau yang disebut dengan *Grass Root Refinery (GRR)* dan *Refinery Development Masterplan (RDMP)*.

Pada tahap awal Pertamina akan membangun GRR di Bontang Kalimantan Timur dan di Tuban Jawa Timur, RDMP di Dumai, Plaju, Balongan, Cilacap dan Balikpapan. Namun pada pelaksanaannya banyak permasalahan yang timbul misalnya terkait pengadaan lahan kilang yang minimal membutuhkan 500Ha, pemberian insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance dan kemudahan lain seperti penggunaan infrastruktur penunjang lain seperti pelabuhan, kereta api dan bahkan jalan tol.

Selain menugaskan Pertamina melaksanakan GRR dan RDMP, Pemerintah juga berusaha memanfaatkan aset kilang petrokimia yang ada,

yaitu dengan memanfaatkan kilang aromatik milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban Jawa Timur yang saat itu sedang carut marut dikarenakan status hukum pemilikinya yang dinyatakan default oleh Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN). Pemerintah telah mengeluarkan regulasi restrukturisasi TPPI melalui akuisis holding TPPI yaitu PT Tuban Petrochemical Industries melalui Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries. Dengan regulasi ini PT Pertamina membeli bagian saham PT TPI sehingga menjadi pemilik mayoritas. Pengembangan dan pembangunan kilang aromatik PT TPPI kedepan terdiri atas 2 proyek besar, yaitu Proyek Pembangunan Olefin Complex (estimasi investasi USD 3,9 miliar) serta Proyek Revamping Unit Aromatic dan Platformer (estimasi investasi USD 179,5 juta).

Dari rencana pembangunan dan pengembangan industri petrokimia di atas, terdapat kesulitan yang dihadapi, diantaranya:

1. Hengkangnya beberapa partner kerjasama. Seperti sudah kita ketahui bahwa terdapat beberapa partner Pertamina yang secara resmi mengakhiri kerjasama dalam pembangunan kilang diantaranya Oman Overseas Oil & Gas (OOG) di Proyek Kilang Bontang dan Saudi Aramco untuk RDMP Cilacap. OOG hengkang dikarenakan adanya perubahan supply dan demand yang dilakukan oleh Pertamina sedangkan Saudi Aramco hengkang dari Cilacap dikarenakan tidak mencapainya kesepakatan terkait nilai valuasi Kilang Cilacap. Diharapkan seluruh pihak khususnya Kementerian/Lembaga untuk dapat membantu Pertamina untuk dapat

mendapatkan partner baru misalnya dengan mengadakan kerjasama investasi antar negara yang dilaksanakan di Kementerian Investasi dan K/L lainnya.

2. Penyediaan lahan yang sulit

Kesulitan yang kedua adalah penyediaan lahan, penyediaan lahan merupakan hal yang krusial dalam pembangunan dan pengembangan kilang dikarenakan infrastruktur utama maupun pendukung kilang membutuhkan lahan minimal 300-600 Ha tergantung spesifikasi dan kapasitas kilang. Penyediaan lahan seluas itu sangatlah sulit apalagi pembangunan kilang tersebut ada di Pulau Jawa. Seperti kita ketahui, untuk penyediaan lahan untuk GRR Tuban juga berlangsung lama. Sama seperti Tuban, GRR Bontang pada awalnya pun dihadapkan dengan penyediaan lahan.

Selain itu, penyediaan lahan untuk RDMP juga mengalami hal yang serupa seperti penyediaan lahan RDMP Cilacap dan Balongan mengalami beberapa kendala seperti relokasi masyarakat sekitar, relokasi jalan raya, relokasi jalur aliran sungai dan lain-lain. Dari permasalahan lahan ini, diharapkan adanya opsi pengadaan lahan misalnya dengan Kawasan Ekonomi Khusus atau penggunaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset, dll.

3. Permodalan Pertamina

Pertamina sebagai BUMN yang memiliki kewajiban *Public Service Obligation (PSO)* mempunyai kewajiban untuk memenuhi berbagai penugasan pemerintah. Salah satu kewajiban ini adalah pembangunan dan pengembangan kilang melalui GRR dan RDMP dan pengembangan di Kilang TPPI.

Pertamina sebagai pemilik proyek ini harus menyiapkan *capital expenditure* mencapai lebih dari US\$ 40 miliar. Untuk memenuhi proyek ini Pertamina tidak akan mampu membiayai dengan modal sendiri. Pertamina diminta mencari partner dan sumber permodalan sendiri baik itu dengan *corporate loan* maupun dengan *project financing*.

REKOMENDASI

Untuk menjadikan Pertamina sebagai pemain utama industri petrokimia dalam negeri, dibutuhkan beberapa alternatif khususnya dalam bentuk dukungan pemerintah diantaranya:

1. Diperlukannya koordinasi khususnya Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan dalam mendukung dan mengawal terhadap investasi yang datang, dengan memberikan kemudahan fiskal, dalam bentuk tax holiday dan tax incentive serta kemudahan lain dalam bentuk pengkreditan pajak masukan, percepatan pemberian pembebasan bea masuk *masterlist*.
2. Penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung dalam pembangunan industri petrokimia mutlak harus disediakan, penggunaan lahan pemerintah menjadi opsi utama. Peran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menjadi penting dalam penyediaan lahan ini, diharapkan LMAN dan BUMN dapat bersinergi dalam penentuan perhitungan *Business to Business*. Selain itu, diperlukan peran Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam persetujuan pengembangan beberapa KEK agar beberapa proyek petrokimia mendapatkan fasilitas fiskal lengkap.
3. Penguatan permodalan BUMN, dapat diberikan dalam bentuk Penanaman Modal Negara, atau pendanaan lainnya seperti *direct lending* dll

DAFTAR PUSTAKA

Website

Bisnis.Com.2021. Kisah Pembebasan Lahan Kilang Tuban yang Happy Ending bagi Warga. Di akses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210219/44/1358454/kisah-pembebasan-lahan-kilang-tuban-yang-happy-ending-bagi-warga>

CNN Indonesia. 2019. Dimodali Pemerintah Rp2 T, Tuban Petrochemical Bangun Pabrik. melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191018183803-85-440795/dimodali-pemerintah-rp2-t-tuban-petrochemical-bangun-pabrik>.

Dewan Nasional KEK. 2023. Fasilitas dan Insentif. di akses melalui <https://kek.go.id/fasilitas-dan-insentif>

Kumparan. 2020. Ditinggal Mitra, Pertamina Batalkan Proyek Kilang Bontang. Di akses melalui <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ditinggal-mitra-pertamina-batalkan-proyek-kilang-bontang-1thwo3J6s9S>

Provinsi Kalimantan Timur. 2020. BCIP Usulkan Kek Baru di Kutim, Gubernur Isran Dukung Penuh. di akses melalui <https://kaltimprov.go.id/berita/bcip-usulkan-kek-baru-di-kutim-gubernur-isran-dukung-penuh>

